BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan Nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan dalam arti tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri.

Penerimaan pajak sebagai sumber dana utama dalam melaksanakan pembangunan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak lain-lain. Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak perlu diadakan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan menjangkau wajib pajak yang baru, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh dengan peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administrasion reform*), pelayanan prima terhadap wajib pajak, pembinaan terhadap wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyelidikan, dan penagih aktif, serta penegak hukum atau *law enforcement*.

Sistem pemungutan pajak yang dianut dinegara kita adalah berdasarkan pada *self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada kantor pelayanan pajak (KPP). Namun sistem *self assessment* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidak patuhan para wajib pajak atas kewajiban perpajakan. Dalam hal ini perlu adanya peran aktif dari pemerintah (*fiscus*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Agar sistem *self assessment* ini berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*low enforcement*) merupakan hal yang paling utama. Adanya kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penegak hukum (*low enforcement*) ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, memberitahukan dengan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang-barang yang telah disita. Tindakan – tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tindakan penagihan yang bersifat pasif, berupa teguran atau peringatan dan penagihan tindakan aktif yang terdiri dari pemberian surat paksa yang diikuti dengan pelaksanaan sita dan penjualan yang disita secara langsung. Tujuan penagihan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasi hutang pajak oleh wajib pajak sebagaimana mestinya, memerlukan tindakan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengeluarkan Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa. Dalam Undang – Undang ini disebutkan, apabila seorang wajib pajak sudah diinformasikan bahwa penghitungan pajak mengalami kekurangan bayar tetapi tidak juga dilunasi sampai tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah penagihan dengan surat paksa. Surat paksa ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama

dengan putusan pengadilan pajak yang didalamnya terdapat kekuatan hukum yang tetap dan dapat juga diajukan keningkat kasasi yang lebih tinggi.

Dengan terdapatnya peraturan – peraturan tentang tindakan penagihan pajak dengan surat paksa didalam undang – undang, hal demikian mempunyai akibat untuk mencegah adanya kehendak kepada pihak pembayar pajak untuk memenuhi kewajibanya. Agar terjamin penerimaan pajak ke kas Negara, maka dalam hal ini diadakanlah pelaksanaan yang bersifat tidak langsung, yaitu dengan penyitaan dan pelelangan barang-barang orang yang berhutang pajak. Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan akan memberikan penekanan yang lebih baik pada keseimbangan antara kepegangan masyarakat dan kepentingan Negara.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar efektifitas surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak, dengan mengangkat judul penelitian “Efektifitas Surat Paksa Guna Mengurangi Penunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar”.

B. Permasalahan

Wilayah kerja KPP Paratama Blitar meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Kota Blitar terletak 160 Km sebelah barat daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar dengan Luas wilayah 32,58 Km² dan merupakan kota terkecil ketiga setelah Kota Batu

dan Kota Mojokerto. Dalam pelaksanaan penagihan pajak diwilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar banyak sekali ditemui masalah, antara lain banyak wajib pajak yang dikenai penagihan pajak dengan surat paksa karena adanya hutang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran berakhir.

Kinerja seksi penagihan di KPP Pratama Blitar mencatat bahwa surat paksa yang terbit pada tahun 2012 sebanyak 240 dengan total tunggakan yaitu sebesar Rp.446.409.138,- dan terealisasi sebesar Rp.297.330.558,-. Pada tahun 2013 sebanyak 247 dengan total tunggakan sebesar Rp. 5.224.550.094,- dan terealisasi sebesar Rp. 548.439.125,-. Pada tahun 2014 sebanyak 906 dengan total tunggakan sebesar Rp. 4.159.853.684,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.085.174.976,-. Pada tahun 2015 sebanyak 554 dengan total tunggakan sebesar Rp.35.798.853.366,- dan terealisasi sebesar Rp.3.686.311.721,- untuk lebih jelasnya data tunggakan dan jumlah surat paksa yang terbit dikantor pelayanan pajak pratama blitar selama tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Table 1.1 data jumlah surat paksa yang terbit dan jumlah tunggakan pajak atas surat paksa selama tahun 2012 – 2015

NO	TAHUN	SP TERBIT	TUNGGAKAN PAJAK ATAS SP	REALISASI ATAS SURAT PAKSA
1	2012	240	Rp. 446.409.138	Rp 297.330.558
2	2013	247	Rp.5.224.550.094	Rp 548.439.125
3	2014	906	Rp.4.159.853.648	Rp 1.085.174.976
4	2015	554	Rp.35.798.853.366	Rp.3.686.311.721

Sumber : *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, 2015*

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan diatas,maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah ‘ Bagaimana meningkatkan Efektifitas surat paksa guna mengurangi penunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas surat paksa guna mengurangi penunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun kajian dibidang hukum pajak terutama yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa guna mengurangi penunggakan pajak.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dalam peningkatan penagihan pajak dengan surat paksa.